

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas batik di Blitar dalam pengembangan industri kreatif telah menunjukkan progres yang positif meskipun masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan kerangka *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), kolaborasi ini telah mencerminkan lima elemen utama, yakni terbangunnya dialog tatap muka sebagai sarana komunikasi awal, munculnya kepercayaan melalui keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan, komitmen pemerintah dalam memfasilitasi program-program pengembangan, terbentuknya pemahaman bersama antaraktor terhadap pentingnya kolaborasi lintas sektor, serta tercapainya hasil sementara berupa peningkatan kapasitas pelaku batik dan eksistensi batik Blitar di berbagai ajang promosi. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan terhadap aspek inklusivitas, pendampingan teknis yang merata, serta evaluasi berbasis hasil (*outcome-based*) agar kolaborasi ini benar-benar mampu memberikan dampak konkret dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan perajin serta daya saing industri batik Blitar.
2. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas batik di Blitar telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian lokal dan daya saing produk. Hal ini terlihat dari meningkatnya

pendapatan pelaku usaha batik sebesar 50%–70%, serta terciptanya lapangan kerja baru di sektor produksi, pemasaran, dan pariwisata. Di sisi lain, daya saing produk juga meningkat melalui inovasi motif lokal, promosi digital, dan keikutsertaan dalam pameran. Meski demikian, kolaborasi ini masih menghadapi hambatan berupa pergantian pengurus yang tidak konsisten, keterbatasan fasilitas teknis seperti IPAL, kurangnya pelatihan promosi, minimnya koordinasi lintas dinas, serta pemangkasan anggaran pelatihan dan pameran. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan keberlanjutan program menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi kolaborasi secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini, maka untuk mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas batik dalam pengembangan industri kreatif di Blitar, peneliti memberikan beberapa saran yang dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor penghambat utama sebagai berikut:

1. Diperlukan penyusunan rencana kerja jangka menengah dan panjang yang dapat dijadikan acuan program, sehingga kegiatan asosiasi tetap dapat berjalan secara konsisten meskipun terjadi pergantian pengurus. Dokumen perencanaan ini sebaiknya disusun secara partisipatif antara pemerintah daerah dan asosiasi batik agar memiliki daya guna dan legitimasi bersama. Selain itu, penguatan kapasitas organisasi asosiasi

juga penting dilakukan melalui pelatihan manajemen kelembagaan dan peningkatan kompetensi kepemimpinan.

2. Pemerintah daerah disarankan untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan fasilitas teknis yang mendukung produktivitas perajin, seperti penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), alat produksi yang memadai, serta ruang pelatihan yang representatif. Program pelatihan juga perlu diperluas tidak hanya pada keterampilan membatik, tetapi mencakup inovasi desain, pemanfaatan teknologi digital, serta strategi branding dan pemasaran. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan vokasi dapat menjadi solusi strategis dalam peningkatan kapasitas teknis pelaku industri batik.
3. Untuk mengatasi lemahnya koordinasi antar dinas, diperlukan pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, serta perwakilan asosiasi batik. Forum ini berfungsi untuk merancang program bersama, menyelaraskan agenda kerja, serta mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program kolaboratif. Selain itu, dibutuhkan penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan industri batik yang terintegrasi, agar setiap program memiliki arah dan sasaran yang jelas.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengupayakan alternatif pendanaan melalui kerja sama dengan sektor swasta, program Corporate Social Responsibility (CSR), maupun lembaga donor nasional dan internasional. Selain itu, perlu diterapkan prinsip penganggaran berbasis

hasil (outcome-based budgeting) agar alokasi dana lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan daya saing pelaku usaha. Prioritas anggaran hendaknya difokuskan pada program pelatihan, promosi, dan fasilitasi legalitas usaha, karena aspek tersebut berperan strategis dalam pengembangan industri batik yang berkelanjutan.